



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG
SATKER 450417 LAN JAKARTA
NOMOR: 156/KPAB.1.1/HKM.02.2/2016
TENTANG

PERBAHAN ATAS KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
SATKER 450417 LAN JAKARTA NOMOR: 78/KPAB.1.1/HKM.02.2/2016
TENTANG TIM PELAKSANA PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
SOSIALISASI PEDOMAN TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN

KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG
SATKER 450417 LAN JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian pelaksanaan kegiatan dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Tim Pelaksana, dipandang perlu menambahkan lokus sosialisasi dan susunan Tim Pelaksana sebagaimana diatur dalam Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Satker 450417 LAN Jakarta Nomor: 78/KPAB.1.1/HKM.02.2/2016 tentang Tim Pelaksana Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Sosialisasi Pedoman Teknis Jabatan Fungsional Analis Kebijakan;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Satker 450417 LAN Jakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran dan Belanja Negara Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
8. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
9. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.02/2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1041);
11. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Standar Honorarium dan Transport Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 46);

Memperhatikan : Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 463/K.1/HKM.03.1 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Satker di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 156/K.1/HKM.02.2/2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menambah lokus sosialisasi sebagaimana diatur dalam Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Satker 450417 LAN Jakarta Nomor: 78/KPAB.1.1/HKM.02.2/2016 tentang Tim Pelaksana Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Sosialisasi Pedoman Teknis Jabatan Fungsional Analis Kebijakan yaitu Lampung dan Manado.

KEDUA : Menambah susunan Tim Pelaksana dalam lokus sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:

11/2/17

1. Tim Pelaksana Penyelenggaraan Sosialisasi Pedoman Teknis Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan di Lampung

No.	Nama	Jabatan	Honorarium
1.	Erna Noviyanti, S.Sos., M.Si.	Penanggung jawab	Besaran honorarium Penanggung jawab per Kegiatan/ Rp. 0,-
2.	Sudarto, SE	Ketua	Besaran honorarium Penanggung jawab per Kegiatan/ Rp. 0,-
3.	Toofik Dwi Nugroho, S.Sos	Sekretaris	Besaran honorarium Penanggung jawab per Kegiatan/ Rp. 0,-
4.	Endang Purwanti	Anggota	Besaran honorarium Penanggung jawab per Kegiatan/ Rp. 0,-

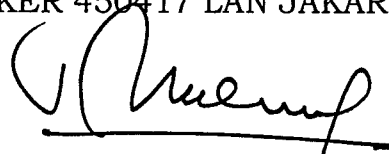
2. Tim Pelaksana Penyelenggaraan Sosialisasi Pedoman Teknis Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan di Manado

No.	Nama	Jabatan	Honorarium
1.	Erna Irawati, S.Sos., M.Pol. Adm.	Penanggung jawab	Besaran honorarium Penanggung jawab per Kegiatan/ Rp. 0,-
2.	Ike Yuliami, S.Pd., M.E.	Ketua	Besaran honorarium Penanggung jawab per Kegiatan/ Rp. 0,-
3.	Sulistio Satrio Firdaus, S.Pd.	Sekretaris	Besaran honorarium Penanggung jawab per Kegiatan/ Rp. 0,-
4.	Galuh Nariswari, A.Md.	Anggota	Besaran honorarium Penanggung jawab per Kegiatan/ Rp. 0,-

- KETIGA : Rincian tugas dari masing-masing anggota Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran V Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Satker 450417 LAN Jakarta Nomor: 78/KPAB.1.1/HKM.02.2/2016 tentang Tim Pelaksana Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Sosialisasi Pedoman Teknis Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan.
- KEEMPAT : Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Satker 450417 LAN Jakarta Nomor: 78/KPAB.1.1/HKM.02.2/2016 tentang Tim Pelaksana Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Sosialisasi Pedoman Teknis Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2016

KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG
/ SATKER 450417 LAN JAKARTA, *h. 4*



SRI HADIATI W.K.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Lembaga Administrasi Negara;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
5. Inspektur Lembaga Administrasi Negara;
6. Pejabat Pembuat Komitmen pada SATKER 450417 LAN Jakarta untuk Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Deputi Bidang Inovasi Administrasi;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.